



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
^aDIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Jl. Jendral A. Yani. No.10 Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Website : ptun-pontianak.go.id, email : mail@ptun-pontianak.go.id

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN SELEKSI JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN
(POSBAKUM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1054/KPTUN.W6.TUN2/HK2.7/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Seleksi Jasa Konsultasi Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1057/SEK.PTUN.W6.TUN2/KU1.1.1/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025, maka bersama ini kami mengumumkan Penerimaan Pemberi Jasa Konsultan Hukum pada Kegiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pekerjaan

- Nama Kegiatan : Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025;
- Harga Perkiraan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan volume 288 jam layanan dengan jumlah total Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2025;

2. Penyedia : Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Profesi Advokat, atau Organisasi Perguruan Tinggi

3. Kriteria

- a. Perorangan / Badan Hukum;
- b. Berdomisili di Pontianak atau memiliki cabang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menguasai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Seorang advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (KTA) Aktif dan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat serta menguasai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

- e. Memiliki staf/anggota yang nantinya akan bertugas di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang bergelar Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Hukum Syariah serta menguasai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak harus telah menempuh minimal 140 SKS dan lulus Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat.

4. Syarat Pendaftaran

- a. Peserta wajib membuat surat lamaran sebagai calon penyedia jasa Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang ditujukan kepada :

**“TIM Teknis Seleksi Jasa Konsultansi Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggran 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
C.Q. Pejabat Pengadaan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak”**

- b. Surat lamaran dilampiri dengan :
 - 1) Fotokopi akta pendirian Badan Hukum dan/atau perubahannya;
 - 2) Fotokopi pengesahan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
 - 3) Surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 - 4) Fotokopi kartu anggota Advokat yang masih berlaku;
 - 5) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas dengan melampirkan susunan struktur organisasi;
 - 6) Fotokopi NPWP dan nomor rekening bank atas nama badan hukum;
 - 7) Surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas.

5. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

- a. Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran calon penyedia jasa Posbakum mulai hari **Rabu tanggal 5 Desember s/d Rabu tanggal 10 Desember 2024** dari jam **08.00 WIB s.d. 15.00 WIB**;
- b. Berkas lamaran diantar langsung kepada Pejabat Pengadaan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan alamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Pontianak **(Bukan Melalui Pos maupun Email)**.

6. Proses Seleksi

a. Seleksi Administrasi

- 1. Pelaksanaan Seleksi Administrasi akan dilaksanakan pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024**;
- 2. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024**;

3. Calon penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dianggap gugur.

b. Seleksi

1. Tes tertulis akan dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024 jam 09.00 Wib** (dengan catatan peserta yang lulus administrasi lebih dari satu);
2. Seleksi wawancara akan dilaksanakan kepada calon penyedia jasa dengan ketentuan urutan 3 (tiga) besar teratas.
3. Pelaksanaan wawancara pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024 (jam akan ditentukan kemudian);**

7. Pengumuman

Pengumuman Hasil Akhir Pengadaan Jasa Posbakum pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025 pada hari **Jum'at tanggal 13 Desember 2024** melalui **Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman Pengadilatan Tata Usaha Negara Pontianak**.

Hasil Akhir Pengadaan Jasa Posbakum pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025 tidak dapat diganggu gugat.

Pontianak, 5 Desember 2024



Pejabat Pengadaan

Andina Fajariani, SE.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pekerjaan : LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Lokasi : KOTA PONTIANAK
Sumber Pendanaan : APBN TAHUN ANGGARAN 2025

A Biaya Langsung Personil.

No.	Posisi Personil	Jumlah Org	Volume OJ	Satuan Biaya Rp.	Jumlah Biaya Rp.
I	Profesional Staff.				
1	Advokat / Pengacara Piket	1.00	288.00 OJ	100,000.00	28,800,000.00
TOTAL :					28,800,000.00

Pontianak, 5 Desember 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak



HERI PURNOMO, SH.

NIP. 19680606 199303 1 005

LAMPIRAN

KOP SURAT LBH/BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth. :

Tim Teknis Seleksi Jasa Konsultansi Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

C.Q. Pejabat Pengadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
di-

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Sehubungan dengan pengumuman Pengadaan Langsung Lembaga Pemberi Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025 tanggal 5 Desember 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Lembaga Pemberi Jasa Layanan Bantuan Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pontianak, Desember 2024
Lembaga

Nama Jelas
Jabatan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : [diisi wakil sah Lembaga]
No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/pasport]
Jabatan : [diisi jabatan pada lembaga]

Bertindak untuk dan atas nama : Lembaga _____

Dalam rangka seleksi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaksanakan pekerjaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan ini, bersedia menerima sanksi administrative dan sanksi pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Pontianak,2024

Lembaga _____

Nama Jelas

Jabatan

Formulir Isian Kualifikasi
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :[diisi wakil sah Lembaga]
No. Identitas :[diisi nomor KTP/SIM/pasport]
Jabatan :[diisi Jabatan pada lembaga]
Bertindak untuk dan atas nama:[di isi nama lembaga]
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama lembaga _____

Berdasarkan _____ [akta pendirian / anggaran dasar/surat kuasa
disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian / anggaran dasar/surat kuasa] :

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I ;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi ini ;
5. Lembaga yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan ;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus lembaga yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam ;
7. Data-data lembaga yang saya wakili adalah sebagai berikut

A. Data Administrasi

1.	Nama Lembaga	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat kantor Pusat	:	_____
	No. Telp.	:	_____
	No. Fax.	:	_____
	Email	:	_____
4.	Alamat kantor Cabang	:	_____
	No. Telp.	:	_____
	No. Fax.	:	_____
	Email	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Lembaga

1.	Akta Pendirian Lembaga/ Anggaran Dasar Lembaga		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
	d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham	:	_____
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Lembaga / Anggaran Dasar Lembaga		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha Struktur Organisasi

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Lembaga

D. Profil Personil

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Lembaga

E. Data Pengalaman Lembaga

Pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak	Tanggal selesai pekerjaan
			Nama	Alamat/ Telepon	No/Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan lembaga yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam**, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pontianak, Desember 2024
Lembaga _____

Nama Jelas

Daftar Urutan Penyampaian Doktimen

1. Surat Permohonan/Penawaran Kerjasama
2. Isian Kualifikasi
3. Photo copy Akta Pendirian dan Perubahan
4. Photo copy Surat Keterangan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM
5. Photo copy Surat Keterangan Domisili Lembaga /Badan Usaha
6. Photo copy KTP Pimpinan/Direktur/Ketua LBH
7. Photo copy NPWP dan copy Buku Rekening Lembaga
8. Photo copy Anggota Advokat yang masih berlaku
9. Photo copy KTP dan Ijazah S1 Hukum